

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa untuk dippunyai seperti makanan, pakaian, tempat berlindung dan air minum. Hal-hal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup. Kemiskinan juga berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warga negara (Arfiani, 2020). Arti kemiskinan adalah kelaparan, buta huruf, fasilitas kesehatan yang buruk, kekurangan makanan, fasilitas pendidikan yang tidak memadai dan pengangguran (Tahir et al., 2014).

Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar dasar, termasuk kebutuhan pangan dan nonpangan. Dalam hal ini seseorang dianggap miskin ketika tidak memiliki cukup uang untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal yang layak (Sumeitri & Destiningsih, 2022). Fenomena kemiskinan di Indonesia telah ada sejak sebelum reformasi dan tetap menjadi masalah utama yang dihadapi oleh pemerintah hingga saat ini. Relevansi kemiskinan selalu dianggap sebagai masalah utama dalam setiap upaya pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan karena kesejahteraan yang maksimal belum tercapai (Desmawan et al., 2021).

Kemiskinan adalah masalah bagi orang-orang di masyarakat yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari karena rendahnya upah yang tidak sesuai dengan biaya hidup dan meningkatnya

kepadatan penduduk. Hal ini berdampak pada daya saing di berbagai sektor, terutama sektor ketenagakerjaan, yang menyebabkan peningkatan tingkat kemiskinan (Sari, 2021). Pemerintah bertanggung jawab untuk mengurangi kemiskinan di suatu negara atau wilayah dengan menciptakan lapangan pekerjaan. Dengan adanya lapangan kerja, masyarakat akan lebih mudah mendapatkan penghasilan, memperbaiki perekonomiannya, dan memenuhi kebutuhan hidupnya lebih baik dari sebelumnya. Kemiskinan juga disebabkan oleh faktor internal dan eksternal masyarakat (Rahmah et al., 2023).

Penanganan kemiskinan harus menjadi perhatian khusus pemerintah karena kemiskinan merupakan isu multifaset dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs). Program SDGs ini bertujuan untuk terciptanya kehidupan manusia yang lebih baik dalam bidang ekonomi dan sosial, dan bersinergi dengan lingkungan (Alawiyah et al., 2021). Rencana penanggulangan kemiskinan yang unggul didasarkan pada prinsip-prinsip kemiskinan yang dijalani oleh masyarakat itu sendiri. Faktanya bahwa banyak penduduk di daerah terpencil menghadapi kesulitan seperti kekurangan makanan, tidak dapat pergi ke sekolah, dan peradaban mundur. Tentu saja, hal ini berbeda dengan masyarakat miskin kota yang hidupnya tinggal di kolong jembatan. Dalam proses pembangunan nasional, kemiskinan adalah masalah penting yang harus diatasi.

Pemerintah Pusat dan daerah telah melakukan upaya dalam mengurangi angka kemiskinan seperti Program Kartu Indonesia Sehat, Program Keluarga Harapan, Bantuan Stimulan Pembangunan Rumah Swadaya (BSPS), Bantuan Langsung Tunai, Kartu Indonesia Pintar, Program Indonesia Pintar, Kredit Usaha

Rakyat, dan banyak program bantuan lainnya. Namun program rencana yang telah diupayakan tersebut diduga belum maksimal.

Perkembangan tingkat kemiskinan di Sumatera Utara pada periode tahun 2019 – 2023 ditunjukkan pada tabel 1.1. Tingkat kemiskinan mencakup besaran jumlah dan persentase dari penduduk miskin. Pada periode tersebut perkembangan tingkat kemiskinan di Sumatera Utara relatif berfluktuasi dari tahun ke tahun. Dapat dilihat tabel berikut ini:

**Tabel 1. 1 Data Kemiskinan, IPM dan Pengangguran di Provinsi Sumatera Utara Tahun (2019-2023)**

Tahun	Kemiskinan (Ribu Jiwa)	IPM (Point)	Pengangguran (Persen)
2019	1.282,04	71,74	5,41
2020	1.283,29	71,77	6,91
2021	1.343,86	72,00	6,33
2022	1.268,19	72,71	6,16
2023	1.239,71	73,37	5,89

*Sumber: Badan Pusat Statistik 2023*

Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui bahwa jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara mengalami fluktuasi selama periode 2019 hingga 2023. Jumlah penduduk miskin tercatat sebesar 1.282,04 ribu jiwa pada tahun 2019. Angka ini mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2020 menjadi 1.283,29 ribu jiwa, kemudian mengalami peningkatan lagi sebesar 1.343,86 ribu jiwa pada tahun 2021, disebabkan oleh dampak covid-19. Namun, mulai tahun 2022 jumlah penduduk miskin mulai menunjukkan tren penurunan, yaitu sebesar 1.268,18 ribu jiwa, dan kembali menurun pada tahun 2023 menjadi 1.239,71 ribu jiwa. Meskipun terjadi penurunan, angka tersebut menunjukkan bahwa Provinsi Sumatera Utara antar kabupaten/kota masih terdapat penduduk miskin.

Apabila dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia, pada tahun 2023 persentase penduduk miskin di Sumatera Utara berada sedikit di bawah persentase penduduk miskin Indonesia. Persentase penduduk miskin di Sumatera Utara menempati peringkat ke-17 terendah dari 34 provinsi. Persentase penduduk miskin di Indonesia adalah 9,36 persen dan Sumatera Utara 8,15 persen. Jika dilihat data antar kabupaten/kota di Sumatera Utara, Kabupaten Pakpak Bharat menempati peringkat pertama dengan jumlah penduduk miskin terendah, yaitu sebesar 4,01 ribu orang. Sebaliknya, Kota Medan menempati peringkat tertinggi dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 187,28 ribu orang pada tahun 2023. Kondisi ini dapat terjadi karena berbagai faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan, antara lain pertumbuhan ekonomi yang rendah, distribusi pendapatan yang tidak merata, tingkat pengangguran yang tinggi, inflasi yang tidak terkendali, serta keterbatasan akses terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan.

Adapun penelitian ini lebih memfokuskan pada faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Sumatera Utara, yaitu variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan tingkat pengangguran.

Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat keberhasilan dalam upaya pembangunan hidup masyarakat adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Konsep IPM pertama kali dipublikasikan UNDP melalui Human Development Report tahun 1996, yang kemudian berlanjut setiap tahun. Indeks Pembangunan Manusia adalah indikator yang mengukur pencapaian pembangunan manusia berdasarkan tiga dimensi dasar seperti umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak (BPS, 2023). Dalam Proses

pembangunan manusia suatu negara ataupun wilayah merupakan subjek sekaligus objek, artinya manusia adalah pelaku dan sasaran pembangunan (Khairunnisa et al., 2023).

Berdasarkan data tabel 1.1 Pembangunan manusia terus mengalami kemajuan, dengan statusnya berada di level tinggi yang berarti pencapaian ini bagus secara keseluruhan, kualitas hidup masyarakat telah meningkat, dengan akses yang lebih baik terhadap layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan sejak tahun 2019-2023. Selama periode 2019–2023, Indeks Pembangunan Manusia meningkat dari 71,74 pada tahun 2019 menjadi 73,37 pada tahun 2023. Fenomena yang terjadi pada tahun 2021 menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia mengalami peningkatan sebesar 72,00 sementara tingkat kemiskinan juga meningkat sebesar 1.343,86 ribu jiwa. Hal ini mengindikasikan adanya pertentangan dengan teori, dimana meskipun kualitas hidup, pendidikan, dan kesehatan umum membaik, masih terdapat kelompok masyarakat yang belum merasakan manfaat pertumbuhan secara merata.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat dilakukan melalui berbagai kebijakan antara lain melalui pembangunan pendidikan yang dibarengi dengan pembangunan ekonomi dimasa yang akan datang, pembangunan kesehatan dengan cara menumbuhkan budaya hidup sehat serta kualitas dari pelayanan kesehatan itu sendiri, sedangkan untuk penduduk miskin dalam rangka meningkatkan kualitasnya dapat dilaksanakan dengan memberikan keterampilan praktis (Mulyadi, 2012). IPM merupakan petunjuk penting dalam menilai perkembangan suatu daerah, mencerminkan kualitas pembangunan dengan

mempertimbangkan aspek pendidikan, kesehatan, dan pendapatan (Sipahutar et al., 2024). Indeks Pembangunan Manusia memiliki hubungan yang sangat erat terhadap tingkat kemiskinan, dimana pada saat Indeks Pembangunan Manusia meningkat, maka tingkat kemiskinan menurun.

Menurut teori pembangunan manusia yang dikemukakan oleh Sen (2017), yang menekankan bahwa pembangunan harus meningkatkan kapabilitas individu dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Peningkatan IPM menunjukkan adanya perbaikan dalam tiga dimensi utama ini, yang pada akhirnya berdampak pada penurunan kemiskinan. Kualitas sumber daya manusia juga dapat menjadi faktor penyebab terjadinya penduduk miskin. Menurunnya IPM bakal berdampak pada rendahnya produktivitas kerja dari penduduk. Untuk mempunyai manusia yang berkualitas dibutuhkan usaha meningkatkan kualitas sumber daya manusianya (Rahmawati & Anwar 2022). Manfaat pentingnya IPM untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk) serta IPM dapat menentukan peringkat atau tingkat pembangunan suatu wilayah/negara (Mongan, 2019).

Penelitian yang menunjukkan bahwa variabel indeks pembangunan manusia berpengaruh terhadap kemiskinan antara lain dilakukan oleh Matondang et al., (2024), Karo-Karo et al., (2024), dan Permatasari (2024), sedangkan penelitian yang menunjukkan bahwa variabel tersebut tidak berpengaruh antara lain dilakukan oleh Thesia et al., (2024), Nujum et al., (2024), dan Purboningtyas et al., (2020).

Pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja, ingin memperoleh pekerjaan tetapi belum mendapatkannya (Sadono, 2015). Pengangguran terjadi karena ketidakseimbangan antara jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia dan tingkat angkatan kerja yang ada, sehingga tidak terjadi penyerapan tenaga kerja dengan efektif. Pengangguran merupakan pertambahan tenaga kerja yang tinggi dari lowongan pekerjaan yang ada. Kaitannya dengan kemiskinan adalah semakin tinggi tingkat pengangguran akan memperburuk/mengurangi kesejahteraan orang itu sendiri karena tidak bekerja. Orang menganggur akan menyebabkan tidak mempunyai pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (Amalia, 2017).

Persoalan ketenagakerjaan adalah persoalan yang begitu jelas dan lekat dengan lingkungan masyarakat. Apalagi persoalan ketenagakerjaan mampu memicu persoalan-persoalan hangat di bidang ekonomi sekalipun nonekonomi. Meningkatnya kemiskinan mengakibatkan menurunnya penghasilan yang kemudian membuat bertambahnya pengangguran. Penyebab meningkatnya jumlah pengangguran yaitu bertambahnya jumlah usia produktif. Dampak buruk dari pengangguran adalah berkurangnya tingkat pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran/kesejahteraan.

Berdasarkan tabel 1.1 diatas diketahui bahwa pengangguran pada tahun 2019 sebesar 5,41 persen, terjadinya peningkatan lagi pada tahun 2020 sebesar 6,91 persen yang disebabkan dari covid-19, yang menyebabkan banyak pekerja yang di PHK (pengurangan tenaga kerja) oleh perusahaan. Namun, pada tahun-tahun berikutnya, pengangguran mulai menunjukkan penurunan. Pada tahun 2021

menurun menjadi sebesar 6,33 persen, kemudian kembali turun pada tahun 2022 sebesar 6,16 persen, dan pada tahun 2023 mengalami penurunan lagi sebesar 5,89 persen. Fenomena menarik terjadi pada tahun 2021, dimana angka pengangguran mengalami penurunan sebesar 6,33 persen, namun kemiskinan justru meningkat sebesar 1,343,86 ribu jiwa. Hal ini bertentangan dengan teori ekonomi klasik yang berasumsi bahwa semakin banyak orang yang bekerja, maka pendapatan rumah tangga akan meningkat, yang pada akhirnya mengurangi kemiskinan.

Penelitian yang menunjukkan bahwa variabel Pengangguran berpengaruh terhadap kemiskinan antara lain dilakukan oleh Sabilillah et al., (2024), Zanzibar et al., (2024), dan Azriyansyah, (2022), sedangkan penelitian yang menunjukkan bahwa variabel tersebut tidak berpengaruh antara lain dilakukan oleh Alfikri et al., (2025), Hasibuan (2023), dan Usman & Mita (2018).

Penelitian terdahulu lebih banyak mengkaji variabel kemiskinan yang dipengaruhi oleh variabel upah minimum regional, tingkat partisipasi angkatan kerja, pendapatan asli daerah, Investasi, rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup, inflasi, pengeluaran pemerintah, pertumbuhan ekonomi, pendidikan, inflasi, dan variabel lainnya. Sejauh ini, masih sedikit yang menggabungkan antara variabel Indeks Pembangunan Manusia, Pengeluaran Perkapita dan Pengangguran terhadap Kemiskinan. Lokasi penelitian ini dilakukan di Provinsi Sumatera Utara mencakup 33 kabupaten/kota dengan periode observasi selama 5 tahun dari 2019 sampai 2023. Oleh karena itu, model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model data panel.

Alasan memilih lokasi Sumatera utara sebagai objek penelitian karena Provinsi Sumatera Utara adalah wilayah dengan posisi geo-ekonominya yang sangat strategis merupakan jalur lalu lintas perdagangan tersibuk di dunia, dan memiliki sumber daya alam yang melimpah berbagai macam ragam antar kabupaten/kota. Salah satu potensi sumber daya alam yang dihasilkan yaitu produksi perikanan laut selat malaka sebesar 239.000 ton per tahun dan samudera hindia sebesar 917.000 ton per tahun. Pada luas area perkebunan sejumlah 1.999.403 hektar atau 27,89 persen dari luas Provinsi Sumatera, dengan total produksi lebih kurang 4.411.536,55 ton, diantaranya sawit, kopi, karet, tembakau, kelapa, dan komoditi lainnya (sumuprov.go.id 2019). Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas dan hasil penelitian yang berubah dari waktu ke waktu ini membuat penulis tertarik untuk meneliti mengenai **“Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Sumatera Utara”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, terdapat beberapa permasalahan dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara?
2. Bagaimana pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara?
3. Bagaimana pengaruh indeks pembangunan manusia dan pengangguran terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, dapat diuraikan tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan di provinsi Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.
3. Untuk mengetahui pengaruh indeks pembangunan manusia dan pengangguran terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

1. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu ekonomi, khususnya ilmu ekonomi regional, terkait strategi pengentasan kemiskinan.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperluas pemahaman akademik serta menjadi referensi bagi pembaca yang ingin mendalami topik serupa.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

1. Bagi Pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam merumuskan kebijakan pengentasan kemiskinan.
2. Bagi peneliti berikutnya, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan untuk peneliti selanjutnya yang ingin mengembangkan penelitian yang serupa mengenai kemiskinan.